

DISERTASI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA DALAM
PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA**

**NURULLAH
2341214310032**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026**

DISERTASI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA DALAM
PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA**

Oleh :

NAMA : NURULLAH
NIM 2341214310032

Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurullah
NIM : 2341214310032
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA
DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 26 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Nurullah
NIM 2341214310032



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

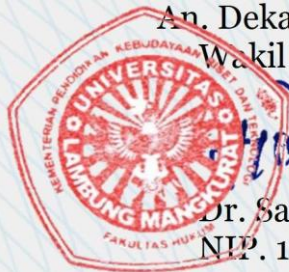
NURULLAH
2341214310032

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

18 %

Banjarmasin, 3 Februari 2025

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

[Signature]
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA"

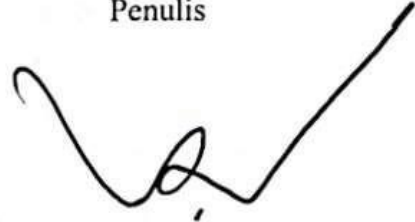
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Disertasi ini. Diselesaikannya Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Irjen.pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. selaku Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sekaligus rekan seperjuangan Penulis dalam menimba ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang terus mendorong Penulis untuk tetap menuntut ilmu hingga jenjang S3 ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Co. Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
5. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
7. Seluruh Dosen pengasuh matakuliah di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
8. Segenap Staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
9. Istri Penulis, Ibu Yayuk Rachmanti, S.T. yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan penelitian ini.
10. Putra-Putri Tercinta Penulis, M. Raihannatullah, Navissa Ulfath Qaistira dan Diva Nauli Maharani yang menjadi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
11. Teman-teman penulis di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM angkatan III dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 26 Januari 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long upward stroke on the right side.

Nurullah

RINGKASAN

Oleh:

Nurullah

Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik merupakan instrumen penting dalam menjaga kemurnian sistem demokrasi di Indonesia. Meski kewenangan ini telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sampai saat ini belum pernah digunakan. Pembatasan legal standing yang hanya memberikan hak kepada pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan/atau Jaksa Agung) menimbulkan potensi conflict of interest serta membatasi akses masyarakat untuk mengajukan kontrol terhadap partai politik yang menyimpang. Hal ini dapat berdampak pada pelemahan prinsip demokrasi partisipatoris dan perlindungan konstitusional warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara mendalam aspek legalitas, prosedural, dan substansi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Penelitian ini berupaya memberikan konsep reformulatif terhadap ketentuan legal standing, merumuskan parameter substantif pembubaran partai politik berbasis prinsip due process of law, dan mengajukan pengaturan baru terhadap konsekuensi hukum dari pembubaran partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Legal standing dalam perkara pembubaran partai politik yang saat ini hanya diberikan kepada pemerintah bertentangan dengan prinsip demokrasi inklusif dan membuka ruang konflik kepentingan. Perlu perluasan hak untuk mengajukan permohonan kepada lembaga independen lain seperti Komnas HAM atau KPU.
2. Implikasi hukum dari putusan pembubaran partai politik belum diatur secara komprehensif, terutama terkait status pejabat publik yang dicalonkan oleh partai yang dibubarkan, pengelolaan aset partai, serta pertanggungjawaban hukum yang ditinggalkan.
3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik belum optimal karena tidak adanya pedoman substantif yang memadai. Hal ini menyebabkan kewenangan tersebut bersifat dormant dan belum menjadi alat yang efektif dalam menjaga sistem demokrasi dari ancaman ideologis maupun pelanggaran konstitusional oleh partai politik.
4. Penelitian ini memberikan model konseptual pembaruan hukum berupa pengaturan partisipatif dan akuntabel yang memungkinkan penggunaan kewenangan pembubaran partai politik sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan konstitusi secara lebih substantif dan berkeadilan.

SUMMARY

By:

Nurullah

Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University

The authority of the Constitutional Court to dissolve political parties serves as an essential mechanism for maintaining the integrity of Indonesia's democratic system. Although this authority is stipulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution and further regulated by the Constitutional Court Law, it has never been exercised to date. The limitation of legal standing—restricted solely to the government (represented by the Minister of Home Affairs and/or the Attorney General)—creates a potential conflict of interest and limits public access to initiate judicial control over political parties that violate constitutional principles. This situation weakens democratic participation and the protection of citizens' constitutional rights.

This study aims to critically examine the legality, procedural structure, and substantive scope of the Constitutional Court's authority in dissolving political parties. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this dissertation proposes a reformulation of legal standing, the establishment of substantive parameters for political party dissolution based on the principle of due process of law, and regulatory development concerning the legal consequences following the Court's decision.

The research findings indicate that:

- 1. Legal standing in political party dissolution cases, which is currently limited to the government, contradicts inclusive democratic principles and creates potential conflicts of interest. The right to file petitions should be extended to independent institutions such as the National Human Rights Commission (Komnas HAM) or the General Election Commission (KPU).*
- 2. The legal implications of a Constitutional Court ruling that dissolves a political party are not comprehensively regulated. There is a legal vacuum regarding the status of public officials nominated by dissolved parties, the management of party assets, and the handling of any remaining legal obligations.*
- 3. The role of the Constitutional Court in political party dissolution remains dormant due to the absence of substantive guidelines. This limits the Court's effectiveness in using this authority to safeguard democracy against ideological threats or constitutional violations committed by political parties.*
- 4. This dissertation offers a conceptual legal reform model that introduces a participatory and accountable framework, enabling the Constitutional Court's authority to be exercised in a manner that protects democratic values and constitutional supremacy substantively and justly.*

ABSTRAK

Disertasi ini disusun dari hasil penelitian dan kajian terhadap tiga permasalahan utama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi di Indonesia. Permasalahan tersebut mencakup: Pertama, mengenai apakah legal standing pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi saat ini mencerminkan prinsip demokrasi; Kedua, bagaimana implikasi hukum dari putusan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi; dan Ketiga, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik sebagai instrumen konstitusional dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung) menimbulkan konflik kepentingan dan membatasi partisipasi publik, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Selain itu, ketentuan mengenai implikasi hukum pasca pembubaran partai politik belum diatur secara komprehensif, menimbulkan kekosongan hukum terhadap status hukum pejabat publik yang diusung oleh partai yang dibubarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik dan dampaknya terhadap penguatan demokrasi. Disertasi ini menawarkan konsep baru berupa reformulasi ketentuan legal standing, penyusunan parameter substantif berbasis prinsip *due process of law*, serta pengaturan lanjutan terhadap konsekuensi yuridis pembubaran parpol.

Dengan menawarkan model hukum yang lebih akuntabel dan demokratis, penelitian ini berkontribusi dalam membangun sistem hukum pembubaran partai politik yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, menjamin perlindungan hak politik warga negara, dan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, Demokrasi, Legal Standing

ABSTRACT

This dissertation is based on research and analysis of three key legal issues concerning the Constitutional Court's authority to dissolve political parties as a means to strengthen democracy in Indonesia. The problems addressed in this study include: First, whether the legal standing of petitioners in political party dissolution cases before the Constitutional Court reflects democratic principles; Second, the legal implications of the Constitutional Court's decisions to dissolve political parties; and Third, how the Constitutional Court's authority in such cases contributes to the development of democracy in Indonesia.

The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The study reveals that the current limitation of legal standing—exclusively granted to the government (Minister of Home Affairs and Attorney General)—creates a conflict of interest and restricts public participation, thus failing to align with the principles of constitutional democracy. Moreover, the absence of comprehensive legal provisions on the consequences of political party dissolution results in legal uncertainty, especially regarding the status of public officials elected under the dissolved party.

This study aims to critically examine the Constitutional Court's role in political party dissolution and its impact on democratic governance. The dissertation offers new concepts, including a reformulation of legal standing to allow broader access to justice, the establishment of substantive parameters based on the due process of law principle, and the formulation of specific regulations to address the legal aftermath of party dissolution.

By proposing a more accountable and democratic legal framework, this research contributes to the development of a dissolution mechanism that upholds the rule of law, ensures the protection of citizens' political rights, and maintains the integrity of Indonesia's democratic system in accordance with constitutional mandates.

Keywords: *Constitutional Court, Political Party Dissolution, Democracy, Legal Standing*

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia, Jerman	154
4.2. Rancangan klausul hukum revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	264
4.3. Tugas Mahkamah Konstitusi Negara Indonesia, Jerman dan Turki.....	316

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN	vi
<i>SUMMARY</i>	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teoritik	17
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Negara Hukum.....	18

2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Kewenangan.....	26
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Demokrasi.....	30
B. Landasan Konseptual	39
1. Konsep Partai Politik.....	39
2. Konsep Politik dan Demokrasi.....	44
3. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia Sebelum Adanya Mahkamah Konstitusi.....	48
4. Kewenangan Mahkamah Kosntitusi.....	55
5. Konsep Supremasi Konstitusi	57
6. Konsep Negara Demokrasi Pancasila.....	60
7. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia	65
C. Bagan Kerangka Pikir	70
D. Definisi Opersional/Konseptual	71
BAB III : METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Sifat Penelitian	74
C. Tipe dan Pendekatan penelitian	75
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	77
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	79
F. Analisis Bahan Hukum	79
G. Sistematika Penulisan	80
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Legal Standing Permohonan Atas Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi.....	83
1. Sejarah Perkembangan Pengaturan dan dinamika Pembubaran Partai	

Politik di Indonesia.....	DAFTAR ISI	83
2. Prosedur Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi.....		96
3. Pihak Yang Berkepentingan Atas Pembubaran Partai Politik.....		121
B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembubaran		
Partai Politik		159
1. Ratio Legis Mahkamah Konstitusi Berwenang Memberikan		
Putusan Tentang Pembubaran Partai Politik		159
2. Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembubaran Partai		
Politik.....		175
3. Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi		213
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembubaran Partai Politik		
Dalam Rangka Pembangunan Demokrasi di Indonesia.....		243
1. Pembangunan Partai Politik oleh Lembaga Peradilan.....		243
2. Kedudukan Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi		268
3. Perbandingan Negara Turki Tentang Kewenangan Mahkamah		
Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik		298
BAB V : Penutup		327
A. Kesimpulan.....		327
B. Saran.....		328

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI